

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan sistem transportasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk pergerakan baik manusia maupun barang, dengan adanya sistem transportasi yang efektif dan efisien yang menjamin setiap pergerakan orang maupun barang merupakan tujuan di sektor transportasi. Apalagi daerah perkotaan, transportasi merupakan peranan terpenting.

Hubungan antara transportasi dan tata guna lahan sangat erat, sehingga dianggap membentuk *landuse transport system*. Agar tata guna lahan bisa terwujud dengan baik maka kebutuhan transportasi harus terpenuhi dengan baik. Buruknya sistem transportasi tentu akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Juga Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan tentu akan menjadi sia-sia.

Kota Magelang merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah bagian tengah yang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Kota Magelang memiliki pusat kegiatan yang bergabung menjadi satu yang merupakan pusat perdagangan, pendidikan, perbelanjaan, kesehatan, rekreasi dan pemerintahan pada saat ini. Dari data praktek kerja lapangan (PKL) menunjukkan Kota Magelang dibagi menjadi 16 zona yang terdiri dari 4 zona CBD dan 12 zona Non-CBD. Zona CBD dibagi menjadi 2 kawasan yaitu kawasan 1 terdiri dari zona 1,2 dan 3 yang merupakan pusat kesehatan, perbelanjaan, rekreasi dan perkantoran. Dan kawasan 2 yang terdiri hanya zona 4 yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan.

Pemerintahan Kota Magelang memiliki masalah terkait kantor pemerintahan saat ini yang berlokasi di Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo No.2, Tenjosari, Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. kepemilikan lahan seluas 40 hektar dan bangunan Mako Akabri yang saat ini dijadikan kantor Pemkot Kota Magelang merupakan Aset milik TNI (Tentara Nasional Indonesia). Adapun OPD yang ada di Kawasan Pemkot

Magelang saat ini berjumlah 9 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Inspektorat, Kantor Walikota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kota Magelang telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1981 hingga saat ini. Karena persoalan tersebut, pemindahan kantor pemerintahan harus segera dilakukan. Pemerintah Kota Magelang saat ini diberi tenggat waktu 5,5 tahun dari September tahun 2022 hingga tahun 2028. Lokasi kantor pemerintahan yang baru direncanakan berada di kawasan Alun-alun Kota Magelang seluas 1,4 hektar/14.651 meter persegi yang saat ini menjadi kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) Kementerian keuangan. Lahan dan bangunan tersebut dihibahkan oleh kementerian keuangan kepada Pemerintah Kota Magelang untuk dijadikan kantor pemerintahan yang baru.

Perencanaan pembangunan kantor Pemerintahan Kota Magelang yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 hingga tahun 2026 dan perpindahan pegawai dilakukan pada tahun 2027. Berdasarkan tim PKL kota Magelang 2022. Kawasan kantor pemerintah kota magelang sebelumnya berada di zona 4 yang merupakan pusat perbelanjaan dan pusat pemerintahan yang akan dipindahkan ke kawasan Alun-alun Kota Magelang yang merupakan zona 1 CBD sebagai pusat perkantoran dan rekreasi. Zona CBD memiliki tarikan yang tinggi, dengan pindahnya pusat pemerintahan tentunya akan menambah jumlah pergerakan di zona 1 dan berkurangnya pergerakan di zona 4.

Dengan adanya pemindahan kantor tersebut akan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari suatu lahan dengan aktifitas rendah menjadi lahan dengan aktifitas tinggi dan dapat merubah pola perjalanan yang telah ada sebelumnya, seperti perubahan tata guna lahan suatu daerah dibangun menjadi pusat kantor pemerintahan. Hal ini terjadi karena dengan adanya pembangunan pusat kegiatan baru dapat menimbulkan tarikan/bangkitan baru. Selain dari pola pergerakan, pembangunan pusat pemerintahan kota Magelang di kawasan Alun-alun Kota Magelang juga berpengaruh terhadap kinerja ruas yang menjadi akses keluar masuk ke

pusat pemerintahan tersebut, sehingga perlu adanya upaya preventif untuk meningkatkan kinerja ruas jalan dilihat dari aspek keselamatan. Selain kinerja lalu lintas, kebutuhan luas parkir juga dibutuhkan untuk pegawai dan tamu yang berada di lokasi kantor supaya tidak parkir di parkir on street yang berada di Jalan Aloon-Aloon Utara. Dari hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Pemindahan Kantor Pemerintahan Kota Magelang ke Kawasan CBD 1 (Kawasan Alun-Alun Kota Magelang) Terhadap Pola Pergerakan dan Kinerja Lalu Lintas"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kumpulan masalah yang terjadi di wilayah studi dan perlu dikaji melalui sebuah penelitian, berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan kota magelang yang akan beroperasi tahun 2027.
2. Rencana pemindahan kantor pemerintahan kota magelang berada di zona 1 CBD yang merupakan kawasan tarikan yang tinggi.
3. pemindahan kantor Pemerintahan Kota Magelang menyebabkan perubahan pola pergerakan dan kinerja lalu lintas.
4. Perubahan pergerakan dan kinerja lalu lintas akan menyebabkan perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
5. Dibutuhkan kebutuhan luas lahan untuk parkir yang digunakan oleh pegawai dan tamu.
6. Dibutuhkan upaya preventif untuk meningkatkan kinerja lalu lintas terhadap pemindahan kantor Pemerintahan Kota Magelang.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana pola pergerakan Perjalanan dan Kinerja Lalu Lintas di Kota Magelang sesudah adanya pembangunan kantor Pemerintahan Kota Magelang?

2. Bagaimana tingkat pelayanan ruas jalan pada daerah sekitar baik sebelum dan sesudah adanya pembangunan kantor Pemerintahan Kota Magelang?
3. Berapa Luas lahan yang dibutuhkan di Lokasi rencana pemindahan kantor ?
4. Bagaimana upaya dalam melakukan peningkatan kinerja lalu lintas dengan adanya pemindahan kantor Pemerintahan Kota Magelang?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian adalah untuk menganalisis pola pergerakan dan kondisi lalu lintas sebelum dan sesudah adanya pemindahan Kantor Pemerintah Kota Magelang.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perubahan pola pergerakan perjalanan dan Kinerja lalu lintas di Kota Magelang sebelum dan setelah adanya pemindahan kantor Pemerintahan Kota Magelang;
2. Menganalisis tingkat pelayanan ruas jalan pada daerah sekitar baik sebelum dan setelah adanya pembangunan kantor Pemerintahan Kota Magelang;
3. Menganalisis Kebutuhan Luas lahan parkir di Lokasi rencana pemindahan Kantor;
4. Melakukan usulan peningkatan kinerja lalu lintas dengan adanya pembangunan kantor Pemerintahan Kota Magelang.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, agar pembahasan nantinya tidak menyimpang dari tema yang diambil maka penulis membuat batasan batasan masalah yang akan dibahas secara spesifik. Pembatasan ini bertujuan untuk memfokuskan lingkup penelitian agar objek yang dikaji dapat dianalisis lebih dalam sehingga dapat diperoleh gambaran kondisi sebelum dan sesudah pembangunan pusat pemerintahan kota magelang dan diharapkan juga dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Lokasi penelitian adalah Kota Magelang.

2. Pola pergerakan yang akan dikaji adalah pola pergerakan orang sebelum dan sesudah pindahnya Kantor.
3. Ruas jalan yang akan di survei dan di analisis adalah ruas jalan yang akan terpengaruh dengan adanya pemindahan kantor.
4. Objek wawancara penelitian hanya pada pegawai dan tamu yang terdapat di Pemerintah Kota Magelang yang akan dipindahkan.
5. Diasumsikan tempat tinggal pegawai tidak berpindah baik sebelum dan sesudah pemindahan.
6. Kinerja lalu lintas hanya meliputi tingkat pelayanan (*level of service*) ruas jalan terdampak, total panjang perjalanan, dan total waktu tempuh perjalanan berdasarkan pembebanan perjalanan.
7. Tidak membahas biaya perjalanan.
8. Metode analisis yang digunakan adalah metode 4 (empat) tahap transportasi.
9. Aplikasi yang digunakan adalah Visum 22.0